TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA MAKASSAR

Oleh:
DARSI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HASNAWI HARIS

Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di kota Makassar, dan (2) upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam mencegah terjadinya tindakan aborsi di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pola desain deskriptif kualitatif, yang akan mengkaji atau mendeskripsikan secara mendalam dan kualitatif tentang tindak pidana aborsi di kota Makassar. Adapun yang menjadi populasinya adalah dokumen data aborsi yang terjadi dalam wilayah kota Makassar dalam kurun waktu 2008-2014 sebanyak 6 kasus, sedangkan metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan pemilihan teknik dengan sengaja (*purposive sampling*) yaitu salah satu kasus yang terdapat dalam register tindak pidana aborsi yang ditangani hakim dalam lingkup Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam kurun waktu tersebut berfluktuasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan aborsi disebabkan beberapa faktor yaitu internal dan eksternal di mana faktor internalnya adalah kurangnya pemahaman tentang agama dan kurangnya kesadaran diri mengenai tindakan aborsi yang jelas melanggar hukum sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh lingkungan dan pergaulan, sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak aborsi adalah dengan lebih menegakkan hukum sehingga menghadirkan efek jera bagi pelaku aborsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan aborsi dapat bersumber dari dalam dirinya maupun adanya pengaruh dan paksaan dari luar dirinya Adapun upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan aborsi yaitu Upaya preventif yakni dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang berhubungan dengan bahaya melakukan aborsi, mengadakan seminar keagamaan dan upaya represif dengan cara memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan KUHP . Saran Pihak yang berwajib seharusnya memberikan sanksi dan hukuman yang setimpal terhadap pelaku aborsi untuk memberi efek jera kepada si pelaku aborsi ataupun pihak-pihak yang terkait agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Peran serta orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan apabila mengetahui perbuatan tersebut kiranya segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

KATA KUNCI: *Tindak Pidana Aborsi*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dari sekian banyak banyak kasus masalah-masalah moral, aborsi merupakan masalah modern yang paling tajam. Penggunaan aborsi itu adalah sebagai jalan keluar kontrasepsi dan menghilangkan rasa malu terhadap orang lain karena terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka statistik aborsi meningkat dari tahun ke tahun. Secara garis besar tindakan aborsi sangat berbahaya bagi ibu dan juga janin yaitu bisa menyebabkan kematian keduanya.

Masalah *abortus* atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial. *Abortus Provocatus* merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya.

Setiap tahun terdapat sekitar 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia, yang berarti setiap jam terjadi 300 tindakan pengguguran janin dengan resiko kematian ibu. "Sedikitnya 700 ribu diantaranya dilakukan oleh remaja atau perempuan berusia di bawah 20 tahun," kata Deputy Bidang Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Siswanto Agus Wilopo.

Tidak hanya para pengamat atau peneliti yang mampu menafsirkan angka cacat moral remaja saat ini, melainkan masyarakat awam pun mampu membaca sejauh mana kerusakan dan keterpurukan tersebut sehingga hal-hal yang dahulu dianggap sangat tabu dan asing, kini telah menjadi hal yang lumrah bahkan banyak terjadi di masyarakat.

Hal-hal yang seperti itu terkadang dianggap biasa oleh beberapa pihak, padahal kalau kita perhatikan fakta di lapangan. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu mampu memunculkan kejadian besar yang tak jarang menjadi sebuah aib bagi para pelakunya. Contohnya dengan maraknya kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) yang menimpa remaja kita, serta kasus aborsi yang tengah marak di kalangan remaja putri saat ini. Pada hakikatnya keduanya saling berkaitan, sebab

salah satu faktor pemicu terjadinya aborsi adalah karena si remaja putri terlanjur berbadan dua (hamil).

Ketika seorang perempuan mengalami kehamilan tak diinginkan (KTD), diantara jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan upaya aborsi, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Banyak diantaranya yang memutuskan untuk megakhiri kehamilannya dengan mencari pertolongan yang tidak aman sehingga mereka mengalami komplikasi serius atau kematian karena ditangani oleh orang yang tidak berkompeten atau dengan peralatan yang tidak memenuhi standard (Hanifah, 2007).

Aborsi adalah sebuah tindakan yang tidak manusiawi, sebab secara tidak langsung aborsi telah merenggut nyawa seorang bayi yang masih dalam keadaan suci, bahkan tidak sedikit memakan korban yakni si ibu yang mengandung janin tersebut.

Angka aborsi di Indonesia ditaksir mencapai 390 – 100.00 kasus. Angka ini adalah angka yang tercatat resmi di pemerintah, sedangkan kita belum mengetahui angka aborsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi baik melalui perantara dukun atau orang-orang yang hanya memiliki keterbatasan ilmu dalam dunia kedokteran.

TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana

Pengertian pidana adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan ataupun sengsara (*leed*). Hukum pidana mengancam bagi para pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan derita (pidana) kepada siapa saja yang melanggarnya.¹ Menurut Simon dalam Martiman Prodjohamidjojo (1996:57), bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah diakibatkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Djoko Prakoso (1984:89), menegaskan bahwa: Hukum pidana yang berlaku sekarang disebut *Schuldstrafrecht* (hukum pidana kesalahan), yang mengandung arti bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat (*asas nulla poena sine culpa*). Hanya

harus ditambahkan di¹ sini bahwa asaa kesalahan itu tidak berarti bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari apa yang dibenarkan oleh kesalahan dari si pembuat itu.

Martiman Prodjohamidjojo (1996:2) menyatakan bahwa: Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) tindak pidana diklasifikasikan menjadi: (1) Tindak pidana yang berbahaya ringan (2) Tindak pidana yang berbahaya berat. (3) Tindak pidana yang berbahaya sangat serius.

Tindak pidana adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan , sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Istilah “delik” berasal dari bahasa latin “*delictum*” atau “*delicta*”, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Para Sarjana Hukum Indonesia menterjemahkan *strafbaar feit* itu sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, perbuatan yang melawan hukum.

“*Strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Dalam Kamus Hukum Edisi Baru tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”²

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni: (1) suatu perbuatan manusia; (2) perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; (3) perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang pidana

khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Pengertian Aborsi

Aborsi adalah sebuah kata yang diserap dari bahasa Inggris *abortion provocatur* yang berasal dari bahasa latin yang berarti “membuat keguguran”. Atau disebutkan juga bahwa aborsi adalah lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan versi lain menyebutkan aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama kehamilan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aborsi adalah terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. Menurut perspektif medis aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini disebut variabel tunggal yaitu tinjauan tentang tindak pidana aborsi.

Menurut Sukardi bahwa populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara

¹Martiman Prodjohamidjojo . 1996 *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2* (Cetakan I). Jakarta : PT Pradnya Paramita. Hlm 57.

²Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Jakarta: Rineka Cipta. Halm 92.

terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.³ Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen data aborsi yang terjadi dalam wilayah kota Makassar dalam kurun waktu 2008-2014 sebanyak 6 kasus

Penelitian ini adalah menggunakan teknik pemilihan secara sengaja (*purposive sampling*), yakni pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti. Maka sampel dalam penelitian ini adalah salah 1 (satu) kasus yang terdapat dalam register kasus aborsi di Pengadilan Negeri Makassar.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan, maka diperlukan suatu metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, yang untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Aborsi

Yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan aborsi yaitu karena adanya faktor internal dan juga eksternal di mana faktor internal yang dimaksud adalah faktor dari dalam diri pelaku aborsi tersebut, faktor ini timbul karena kurangnya pengetahuan tentang agama sehingga tidak bisa membentengi diri dari pergaulan yang kurang baik sedangkan faktor eksternal di sini yaitu lingkungan atau tempat di mana mereka tinggal, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan agama. Jika seseorang tinggal dalam lingkungan yang baik maka pada umumnya seseorang tersebut akan berperilaku baik. Sebaliknya bila seseorang berada pada lingkungan yang kurang baik maka ia cenderung akan berbuat tidak baik pula. Di mana yang dominan melakukan tindakan aborsi itu adalah remaja, di mana pergaulan remaja sekarang semakin bebas.

Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar

Adapun upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan aborsi yaitu:

Upaya Preventif

Usaha pencegahan atau biasa juga disebut dengan tindakan preventif dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya kejahatan yaitu sebagai usaha perubahan yang positif yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Sehubungan dengan pengertian usaha pencegahan tersebut, maka dalam rangka merubah perilaku pribadi juga harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendorong terjadinya suatu kejahatan. Tujuan upaya pencegahan atas kejahatan antara lain untuk pemeliharaan kelestarian hidup manusia. Menjamin adanya kepastian hidup dan rasa aman masyarakat, mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah tindakan aborsi, yaitu:

- a. Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan komunitas di bidang keteguhan iman dan mental masyarakat yang dilakukan oleh para ulama, pendidikan dan guru penerangan melalui sarana komunikasi sosial yang tentunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan agamanya.
- b. Kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah untuk menggali hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dalam masyarakat.
- c. Tindakan-tindakan unsur penegak hukum dalam rangka *Law Enforcement*, melalui penegak hukum dan koordinasi aparat serta partisipasi masyarakat.

Tindakan Represif

Usaha penindakan biasa juga disebut dengan tindakan represif yang berarti suatu cara untuk menanggulangi suatu kejahatan dengan melakukan penindakan-penindakan atau menghukum para pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penindakan atau penghukuman yang dilakukan merupakan balasan atau hukuman kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera. Penghukuman juga dimaksudkan agar hukum itu dapat menakut-nakuti seseorang supaya mereka jangan berbuat suatu kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan bertujuan pula memperbaiki sistem

³ Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 53

hukum itu sendiri. adapun usaha represif ini dilakukan dengan proses sebagai berikut: Razia, Penangkapan, Penahanan, Peradilan, dan Hukuman.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan tindak pidana terhadap kasus aborsi diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan aborsi dapat bersumber dari dalam dirinya maupun adanya pengaruh dan paksaan dari luar dirinya. Faktor penyebab dari dalam diri wanita yang melakukan tindakan aborsi, seperti muncul perasaan malu jika ketahuan hamil, belum ingin mempunyai anak walaupun tanpa suami sedangkan faktor dari luar diri wanita yang hamil, seperti: dipaksa oleh laki-laki yang menghamilinya, laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab sehingga untuk menghindari tanggung jawab tersebut, maka dia memaksa wanita yang dihamilinya untuk aborsi, dipaksa oleh orang tuanya, faktor kesehatan baik karena masih sangat muda usia ataupun karena ada penyakit. (2) Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk mencegah terjadinya tindakan aborsi di kota Makassar yaitu: (a) Upaya Preventif; Usaha pencegahan atau biasa juga disebut dengan tindakan preventif dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya kejahatan yaitu sebagai usaha perubahan yang positif yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Sehubungan dengan pengertian usaha pencegahan tersebut, maka dalam rangka merubah perilaku pribadi juga harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendorong terjadinya suatu kejahatan. Tujuan upaya pencegahan atas kejahatan antara lain untuk pemeliharaan kelestarian hidup manusia. Menjamin adanya kepastian hidup dan rasa aman masyarakat, mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat. (b) Usaha penindakan biasa juga disebut dengan tindakan represif yang berarti suatu cara untuk menanggulangi suatu kejahatan dengan melakukan penindakan-penindakan atau menghukum para pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut: (1) Pihak yang berwajib seharusnya memberikan sanksi dan hukuman yang setimpal

terhadap pelaku aborsi untuk member efek jera kepada si pelaku aborsi ataupun pihak-pihak yang terkait agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. (2) Peran serta orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan apabila mengetahui perbuatan tersebut kiranya segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Orang tua bisa lebih memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya khususnya remaja guna menghindarkan dirinya dari pergaulan bebas yang pada akhirnya akan membuat aib dan akan merusak nama baik keluarga. (3) Para remaja, agar lebih bisa memilih-milih pergaulan mana yang bisa mengajak mereka ke arah yang lebih positif dan mengimbangi diri dengan iman. Agar tidak terjadi perbuatan yang dapat merusak bahkan membahayakan nyawa kita sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agoes Dariyo. 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Poernomo. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Djoko Prakoso. 1984. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kansil, dkk. 1994. *Latihan Umum Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K. Bertens. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Leden Marpaung. 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim Nainggolan. 2006. *Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Equality. Vol. 40, No. 2.
- Martiman Prodjohamodjojo. 1996. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2 (Cetakan I)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Muhammad Ali. 1990. *Kamus Lengkap bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirjosisworo.1985. *Bunga Rampai Kriminologi*, Bandung: Arnico.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sulaeman Samad. 2008. *Perkembangan Peserta Didik*. Makassar: Penerbit FIP UNM
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Y. Madan. 1995. *Pendidikan Seks Remaja dalam Islam*. Terjemahan oleh: Ija Suntana. Jakarta: Hikmah.
- Rosnaeni Rusli. 2006. *Persepsi Masyarakat terhadap Terjadinya Abortus di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Skripsi. FIS UNM. Makassar.
- Syarifuddin. 2004. *Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kota Makassar*. Skripsi. FIS UNM. Makassar.
- Penerbit Sinar Grafika. 2011. *KUHP dilengkapi dengan UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.Surabaya:Arloka
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.